|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | **Kasubaud**Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Senin, 16 November 2015 |
| Keterangan | : | BPMD Buol Bantah ada Pengendapan Dana Desa |
| Entitas | : | Buol |

**Buol, Metrosulawesi.com -** Dari 108 desa di Kabupaten Buol, tinggal 23 desa yang belum merealisasikan tagihan di TW III karena belum memasukan pertanggungjawaban dari TW sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa kendala. Diantaranya pencairan tahap I dana anggaran desa (DAD) pada  September 2015 setelah penetapan APBD-Perubahan, sehingga mengganggu tagihan tahap-tahap berikutnya.

“Dari 108 desa yang ada di Kabupaten Buol mengalami kendala yang sama, akan tetapi telah mereka selesaikan sehingga mereka saat ini sudah memasuki tagihan tahap ke- IV,” kata Kepala Badan BPMD Kabupaten Buol Masrul Dai Hasim, belum lama ini.

Menurutnya, penyerapan DAD dananya bersumber dari APBN dan alokasi dana desa (ADD) bersumber dari dana APBD II. Untuk DAD mempunyai 3 tahapan penagihan, sedangkan saat ini sudah masuk tahapan ke-III dengan rincian tahap pertama Rp 10.483.803.313.000. Sehingga pada tahap kedua hanya tinggal lebih 60 % dan tahap ke-III tinggal 20% dari jumlah dana Rp7,8 milyar naik menjadi Rp 29.674.005.000, yang nantinya akan direalisasi pada anggaran tambahan pada bulan September 2015.

“Bahwa alokasi dana desa sampai saat ini telah memasuki TW IV dan hanya tinggal 23 desa yang masih berada di TW III, begitu pula dana anggaran desa juga penyerapannya atau pencairan sampai dengan saat ini sudah pada tahap ke-II, dan memasuki tahap ke-III,” tuturnya.

Penjelasan tersebut, kata Masrul untuk mematahkan adanya tuduhan  pengendapan dana DAD maupun ADD.

“Bahwa tuduhan  itu tidak benar, karena sampai dengan tanggal 5 November, penyerapan dana sudah mencapai lebih kurang 70 %. Makanya kalau ada permasalahan ditanyakan langsung pihak yang terkait atau kepada SKPD yang bertanggung jawab, bukan dengan perkiraan individu atau kelompok,” urainya.

Secara terpisah, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Buol Yahya Awad menjelaskan, bahwa ADD dan DAD  sampai dengan saat ini  sudah memasuki TW III, dan sementara pengajuan TW ke-IV dari 108 desa di Buol.

“Untuk proses penyerapan dan pencairan berjalan dengan lancer, dan tidak pernah ada terjadi pengendapan dana seperti anggapan dari beberapa kalangan, hal ini karena mereka tidak mengetahui hanya ingin menghujat kepada SKPD terkait,” katanya.

Ia mengakui, ada beberapa permasalahan kecil terjadi beberapa waktu lampau, dimana keterlambatan penagihan yang disebabkan adanya keterlambatan pertanggung jawaban dari desa pada tahapan sebelumnya. sehingga belum dimasukkan sebagian pertanggung jawabannya.

“Dengan demikian, dana tagihan berikutnya belum dapat terbayar justru itu masuk dulu pertanggung jawaban pemakaian dana yang lalu barulah tagihan berikutnya di bayarkan begitu pula pihak BPPKAD Buol sampai dengan saat ini masih terus mengadakan pembinaan kepada kepala desa, maupun bendarahara desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa agar di kemudian hari tidak terjadi dampak hukum kepada pemerintah daerah maupun pengelola dana desa,” tutupnya.